

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menggunakan regresi data panel *Fixed Effect Model*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kabupaten kota di Provinsi Lampung ; secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, sedangkan variabel DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung.
2. Variabel bebas Jumlah Penduduk (PDK) dihilangkan dari model regresi, karena memiliki hubungan linier (multikolinearitas) yang kuat dengan variabel bebas DAU.
3. Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung.
4. Fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan kabupaten kota yang memiliki derajat otonomi fiskal (DOF) rendah atau tinggi, karena secara statistik perilaku keduanya dalam membiayai belanja daerahnya sama-

sama bergantung pada penerimaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan daerah yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang memiliki PAD rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi pemerintah kabupaten kota di Provinsi Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pembiayaan dalam APBD lebih bergantung pada penerimaan dana-dana transfer (khususnya DAU), maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut pemerintah daerah disarankan melakukan upaya memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah melalui: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak daerah dengan tetap mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, (2) melakukan investasi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor usaha yang prospektif.; dan (3) optimalisasi eksplorasi sumber daya alam untuk meningkatkan potensi dana bagi hasil (DBH).
2. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, maka disarankan kepada pemerintah pusat agar ; (1) menerapkan kebijakan pemberian bantuan yang diarahkan pada kebutuhan daerah

setempat, (2) mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui kebijakan ; (a) memberikan insentif kepada daerah yang mampu menaikkan dan menjaga konsistensi peningkatan kapasitas fiskalnya, sebagai kompensasi pengganti atas berkurangnya celah fiskal, (b) menambah jenis pajak yang dapat dilimpahkan kewenangan pemungutannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, (c) mempertimbangkan kembali sistem bagi hasil dari penerimaan pajak kepada pemerintah daerah, (d) mereformasi pajak-pajak daerah dengan meniadakan pajak-pajak daerah yang tidak produktif., yang dapat menekan biaya pemungutan dan perhatian dapat difokuskan pada jenis pajak yang lebih produktif.